Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan
Vol.10, 4 (Oktober-Desember, 2026), pp.
ISSN: 2597-7377 EISSN: 2581-0251,

Kepemimpinan Model Syiah, Khawarij dan Murjiah Dalam Sejarah Pemikiran Islam

Aprilia Sofiana Umy Wahed[1], Zainuddin Syarif[2], Mahfida Inayati[3]

[1]Universitas Islam Negeri Madura; apriliasofiana04@gmail.com,
[2]Universitas Islam Negeri Madura; doktorzainuddinsyarif@gmail.com,
[3]Universitas Islam Negeri Madura; mahfidainayati99@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Leadership, Imamah, Shi'a, Khawarij, Murji'ah, Islamic Political Thought.

Article history:

Received 2026-10-21
Revised 2026-10-23
Accepted 2026-10-30

ABSTRACT

The question of who is entitled to lead the Muslim community, and on what grounds, was among the earliest and most consequential debates in Islamic history, and it gave rise to distinct schools of political theology. This library research study uses a historical-critical approach and critical content analysis to describe, analyze, and compare the concepts of leadership developed by the Shi'a, Khawarij, and Murji'ah during the formative period of Islam. It addresses three questions: the basic concept of leadership (imamah or khilafah) in each school, the historical and sociopolitical factors behind its emergence, and the points of comparison among the three. The findings show that the Shi'a ground leadership in divine designation (nash) and the spiritual authority of the ahl al-bayt, which yields an absolute-charismatic model. The Khawarij treat leadership as a conditional trust open to any qualified Muslim and revocable when the leader departs from justice, which yields a radical-egalitarian model. The Murji'ah defer judgment on the faith of those involved in political conflict and give priority to communal unity, which yields a moderate-accommodative model. These models are best understood not merely as doctrines but as intellectual responses to the struggle over political legitimacy that followed the death of the Prophet, the arbitration (tahkim) between Ali and Mu'awiyah, and the political conflicts of the early Islamic caliphates.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Corresponding Author:
Aprilia Sofiana Umy Wahed, **Universitas Islam Negeri Madura**; apriliasofiana04@gmail.com,

1. INTRODUCTION

Kepemimpinan termasuk faktor penentu mutu lembaga pendidikan. Kepala madrasah, pimpinan pesantren, rektor perguruan tinggi Islam, dan ketua yayasan tidak hanya mengelola organisasi, tetapi juga membentuk budaya, arah nilai, dan wibawa moral lembaga. Kepemimpinan pendidikan secara umum menunjukkan

bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap iklim organisasi, kinerja pendidik, dan capaian peserta didik. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan kualitas umat Islam di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan Islam yang efektif dan terarah menjadi aspek penting dalam menjamin mutu, relevansi, serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan Islam (Anshory dkk., 2024). Sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki peran yang tidak hanya berkaitan dengan penguatan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan Islam di madrasah perlu diarahkan pada penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui penguatan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan pendidikan yang efektif, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Sari, 2025).

Khazanah intelektual Islam sebenarnya memiliki repertoar pemikiran kepemimpinan yang kaya, terutama dari perdebatan teologi-politik awal Islam. Perdebatan seputar suksesi kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., kriteria seorang pemimpin, serta status pemimpin yang melakukan dosa melahirkan aliran-aliran kalam. Syi'ah menekankan imamah dan kualitas spiritual pemimpin, Khawarij menekankan keadilan, integritas, dan hak umat memberhentikan pemimpin yang menyimpang, Murji'ah menekankan penangguhan penghakiman dan persatuan umat. Pandangan-pandangan ini lahir dari konteks politik yang berbeda, tetapi pertanyaan dasarnya tetap relevan. Pemikiran politik dalam Islam pada dasarnya berkembang sebagai respons terhadap berbagai kondisi sosial dan politik yang terjadi pada suatu masa. Dalam konteks tersebut, kemunculan pemikiran Sunni dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap ketidakpuasan terhadap gagasan politik yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan agama, kekuasaan, dan pemerintahan dalam Islam (Najibudin dkk., 2025).

Kepemimpinan dalam pendidikan Islam merupakan aspek yang sangat penting dalam mengarahkan dan mengelola lembaga pendidikan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam penerapannya, seorang pemimpin pendidikan dituntut untuk menjalankan kepemimpinannya berdasarkan prinsip, aturan, dan etika Islam, baik dalam mengelola individu, tenaga pendidik, peserta didik, maupun seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan (Yani, 2021). Seorang pemimpin dituntut memiliki karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keikhlasan dalam menjalankan amanah, rasa tanggung jawab, visi yang terarah, kemampuan memberikan motivasi, serta kecakapan dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Kepemimpinan yang efektif dalam lingkungan pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga berupaya membentuk

generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, serta akhlak yang mulia (Manzil & Muttaqin, 2024).

Pemahaman terhadap keragaman pemikiran teologis dalam Islam penting untuk membentuk peserta didik agar memiliki wawasan keagamaan yang terbuka dan tidak bersikap eksklusif. Pembahasan mengenai Syi'ah tidak hanya menjadi bagian dari kajian historis dan teologis Islam, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap toleran, menghargai perbedaan pemikiran, serta menyikapi keberagaman umat Islam secara bijaksana (Mulyani dkk., 2026). Khawarij berpandangan bahwa seseorang yang melakukan dosa besar dapat dinilai telah keluar dari keimanan dan menjadi kafir. Sementara itu, Murji'ah memiliki pandangan yang lebih longgar, yaitu pelaku dosa besar tetap dianggap sebagai seorang mukmin selama masih memiliki iman dalam dirinya (Ar, 2026).

Kajian atas ketiga aliran tersebut selama ini cenderung membahas masing-masing secara terpisah, dengan penekanan pada uraian doktrin dan kronologi konflik politik. Pembahasan yang menempatkan ketiganya dalam satu bingkai analisis, yakni membandingkan dasar legitimasi, kriteria pemimpin, dan sikap terhadap pemimpin yang menyimpang sambil menelusuri faktor sosiopolitis yang melatarbelakanginya, masih perlu diperkuat.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya membaca ketiga model kepemimpinan tersebut sebagai satu spektrum respons terhadap perebutan legitimasi politik di awal Islam, yaitu model absolut-karismatik (Syiah), radikal-egalitarian (Khawarij), dan moderat-akomodatif (Murjiah). Penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan doktrin secara normatif, tetapi membedah mengapa masing-masing konsep tersebut muncul, faktor sosiopolitis apa yang melatarbelakanginya, serta di mana titik temu dan perbedaan mendasar di antara ketiganya.

Penelitian ini penting dilakukan karena pemahaman atas akar gagasan kepemimpinan dalam teologi-politik Islam klasik memungkinkan pembacaan yang lebih berimbang atas masing-masing aliran, tidak hanya melihat akses yang dicatat sejarah, tetapi juga rasionalitas teologis-politis yang melatarbelakangi gagasannya. Selain itu, analisis komparatif ini dapat menjadi landasan akademik bagi kajian lanjutan di bidang sejarah pemikiran dan peradaban Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konsep dasar kepemimpinan (*imamah* atau *khilafah*) dalam pandangan teologi-politik Syiah, Khawarij, dan Murjiah? Kedua, faktor historis dan sosiopolitis apa yang melatarbelakangi lahirnya masing-masing model kepemimpinan tersebut? Ketiga, bagaimana titik perbandingan (*comparative analysis*) antara ketiga model kepemimpinan dalam peta sejarah pemikiran Islam klasik?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membandingkan bangunan epistemologi politik Syiah, Khawarij, dan Murjiah secara objektif dan historis, mencakup konsep dasar

kepemimpinan, faktor historis dan sosiopolitis kelahirannya, serta titik temu dan perbedaan mendasar di antara ketiganya.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat historis-kritis, di mana pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap literatur teks klasik, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan sejarah pemikiran politik Islam. Sumber-sumber data tersebut mencakup literatur tentang konsep *imamah* dan *khilafah* dalam pemikiran Syiah, Khawarij, dan Murjiah, termasuk kajian tentang aliran-aliran kalam (*milal wa nihal*) serta sejarah politik pada masa formatif Islam.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi kritis (*critical content analysis*) dalam tiga tahap: mendeskripsikan konsep kepemimpinan masing-masing aliran, menganalisis faktor historis dan sosiopolitis yang melatarbelakanginya, serta membandingkan ketiganya untuk menemukan titik temu dan perbedaan mendasar. Seluruh tahap dilakukan secara objektif dan historis, dengan menempatkan setiap gagasan dalam konteks zaman dan kelompok yang merumuskannya.

Kerangka teoretis penelitian ini memadukan tiga perspektif. Pertama, teologi politik klasik, yang memandang persoalan *imamah* atau *khilafah* dan status pelaku dosa besar sebagai persoalan teologis sekaligus politis. Kedua, teori sejarah pemikiran politik Islam (*Islamic political thought*), yang menelusuri perkembangan gagasan kekuasaan sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik pada masanya. Ketiga, sosiologi pengetahuan, yang memandang gagasan sebagai sesuatu yang terkait dengan posisi dan kepentingan sosial-politik kelompok yang merumuskannya. Ketiga perspektif ini menjadi pisau analisis untuk membedah mengapa konsep kepemimpinan tersebut muncul dan bagaimana ketiganya dapat dibandingkan.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Konsep Dasar Kepemimpinan dalam Teologi-Politik Syiah, Khawarij, dan Murjiah

a. Syiah

Dalam perspektif teologi imamah, Syiah memberikan kedudukan khusus kepada sahabat yang tetap menunjukkan loyalitas dan mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., seperti Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin Aswad, dan Ammar bin Yasir. Konsep otoritas dalam pemikiran Syiah bersifat lebih hierarkis karena imamah dan Ahlulbait ditempatkan sebagai sumber utama otoritas keagamaan yang sah dan memiliki kedudukan penting dalam membimbing umat (Arrodji dkk., 2026).

Secara etimologis, Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti pendukung atau pengikut seseorang, serta dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang

memiliki kesamaan pandangan terhadap suatu perkara. Secara terminologis, Syiah merujuk pada kelompok yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan dibandingkan seluruh sahabat Nabi lainnya dan lebih berhak menjadi khalifah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah saw. Dari perspektif politik, kemunculan Syiah mulai terlihat setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. dan semakin menguat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan awal pemerintahan Utsman bin Affan, umat Islam relatif berada dalam keadaan bersatu. Namun, menjelang akhir kekhalifahan Utsman, berbagai konflik dan peristiwa politik mulai memicu perpecahan yang semakin meluas. Ketegangan tersebut berlanjut setelah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah dan mendapat penolakan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Perselisihan antara kedua pihak akhirnya memuncak dalam Perang Shiffin, yang dikenal sebagai salah satu peristiwa besar dalam sejarah politik Islam dengan istilah al-fitnah al-kubra. Konflik tersebut kemudian turut memengaruhi perkembangan pemikiran politik Islam dan hubungan antara kelompok Sunni dan Syiah pada masa berikutnya (Marjuni, 2020).

Dalam pemikiran Syi'ah, kepemimpinan (*imamah*) bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari prinsip keagamaan. Imam dipandang sebagai figur yang memiliki keunggulan ilmu, kesucian moral, dan otoritas membimbing umat, yang bertalian dengan *ahl al-bayt*. Dalam sebagian tradisi, khususnya Imamiyah, imam dipandang memiliki *'ishmah* (terjaga dari dosa) dan ditetapkan melalui *nash* (penunjukan), bukan sekadar pemilihan. Konsep imamah dalam tradisi Syiah mengalami perkembangan yang mendalam hingga menjadi salah satu doktrin utama dalam aspek teologis. Imamah tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepemimpinan politik, tetapi juga sebagai ketetapan ilahiah yang memberikan legitimasi khusus kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Dalam pandangan Syiah Imamiyah (*Twelvers*), imam diyakini memiliki kedudukan spiritual yang tinggi, memperoleh otoritas dari Tuhan, serta memiliki sifat infalibilitas dalam membimbing umat. Perkembangan doktrin ini semakin kuat pada masa kekuasaan Abbasiyah, ketika konsep imamah juga menjadi dasar keagamaan dalam mempertahankan identitas dan otoritas komunitas Syiah di tengah dominasi kekhalifahan. Dengan demikian, imamah dipandang sebagai manifestasi otoritas ilahiah yang secara khusus melekat pada keturunan Ali. Perkembangan pemikiran tersebut menunjukkan bahwa teologi imamah terbentuk melalui keterkaitan antara keyakinan keagamaan, kondisi sosial, dan dinamika politik dalam perjalanan sejarah Islam (Hafi dkk., 2025).

b. Khawarij

Khawarij merupakan kelompok yang memiliki pandangan tegas dalam memahami keterkaitan antara iman dan amal perbuatan. Menurut mereka, iman tidak cukup hanya diyakini dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Oleh sebab itu, seseorang yang melakukan dosa besar dianggap

telah keluar dari Islam dan dapat diperangi. Dalam hal kepemimpinan, Khawarij berpandangan bahwa seorang pemimpin tidak harus berasal dari suku Quraisy, melainkan siapa pun yang memiliki sifat adil dan saleh berhak menduduki posisi tersebut. Meskipun pemikiran Khawarij dikenal keras, kelompok ini juga memberikan pandangan yang menekankan pentingnya integritas moral, keadilan, dan kesalehan dalam diri seorang pemimpin.(Latifa dkk., 2025)

Khawarij lahir dari konflik politik pasca-tahkim pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam teori politiknya, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang boleh dipegang siapa pun yang layak, tanpa pembatasan garis keturunan atau suku, ditetapkan melalui pemilihan, dan harus dicopot bila menyimpang dari keadilan dan ketentuan agama. Prinsip ini memperlihatkan corak egaliter dan menekankan akuntabilitas. Kemunculan Khawarij dalam sejarah Islam tidak terlepas dari konflik politik mengenai persoalan kepemimpinan umat, terutama setelah terjadinya peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah. Dari konflik tersebut, Khawarij mengembangkan pandangan politik bahwa khalifah tidak harus berasal dari keturunan Rasulullah, suku Quraisy, maupun bangsa Arab, tetapi dapat dipilih dari siapa saja yang memenuhi syarat dan mampu menjalankan syariat Islam. Kepemimpinan juga bersifat kondisional, sehingga seorang khalifah wajib ditaati selama berlaku adil dan menjalankan syariat, tetapi harus diturunkan apabila menyimpang atau berbuat zalim. Khawarij mengakui pemerintahan Abu Bakar dan Umar serta sebagian masa pemerintahan Utsman dan Ali sebelum tahkim, tetapi menilai pemerintahan setelah terjadi penyimpangan politik sebagai tidak sah. Pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi sikap keras terhadap kelompok yang dianggap menyimpang, bahkan pada sebagian kelompok Khawarij mengarah pada pengkafiran dan perlawanan terhadap pihak di luar kelompok mereka. Selain itu, terdapat pandangan bahwa kepemimpinan tidak harus dipegang laki-laki, sehingga perempuan juga dapat menjadi khalifah apabila memenuhi persyaratan (Arifin, 2021).

Di sisi lain, sejarah mencatat sikap Khawarij yang ekstrem, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar (takfir) dan menghalalkan kekerasan terhadap yang berbeda pendapat. Nilai integritas mereka tidak boleh dipisahkan dari kritik atas ekses tersebut. Adopsi nilai Khawarij hanya sah bila akuntabilitas dijalankan secara prosedural, proporsional, dan berkeadilan, dengan asas praduga tak bersalah, mekanisme klarifikasi, serta ruang pembinaan, bukan dengan stigmatisasi dan penghukuman moral yang mengorbankan sesama anggota komunitas. Melalui analisis kritis akses historis, pendidikan Islam diharapkan mampu merekonstruksi relevansi warisan intelektual klasik dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan transformasi teknologi di era digital. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesinambungan epistemologis antara tradisi keilmuan Islam dan dinamika modernitas, sehingga pendidikan Islam dapat melahirkan generasi Muslim yang memiliki kedalaman intelektual,

integritas moral, serta kapasitas kritis dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas tantangan global (Hanafi dkk., 2025).

Dalam perspektif analisis kritis historis, kajian tidak hanya digunakan untuk melacak dan memetakan perkembangan respons pendidikan Islam dari masa ke masa, tetapi juga untuk mengkaji secara kritis berbagai faktor historis, sosial, politik, dan intelektual yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat bagaimana pendidikan Islam merespons perubahan zaman, menyesuaikan diri terhadap dinamika masyarakat, serta mempertahankan atau mengubah gagasan, nilai, dan praktik pendidikan yang berkembang pada setiap periode. Dengan demikian, analisis historis dapat mengungkap kesinambungan, perubahan, maupun ketegangan dalam perkembangan pendidikan Islam sekaligus menjelaskan konteks yang memengaruhi terbentuknya suatu pemikiran atau kebijakan pendidikan (Yulistina & Yustina, 2025).

c. Murjiah

Aliran Murji'ah, sebagaimana pandangan Imam Abu Hanifah, mendefinisikan iman sebagai pengakuan dan pengetahuan terhadap Allah Swt., para rasul-Nya, serta seluruh ajaran yang berasal dari-Nya secara menyeluruh. Dalam pandangan ini, tingkat keimanan manusia tidak dibedakan satu sama lain, dan iman tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Sementara itu, aliran Mu'tazilah berpandangan bahwa seseorang yang melakukan dosa besar tidak serta-merta dihukumi sebagai orang kafir (Adiningsih dkk., 2020).

Murji'ah (dari *irja'*, menunda) menunda penghakiman atas pelaku dosa besar dan menyerahkan keputusan akhirnya kepada Allah. Sikap ini berakar pada keinginan menjaga persatuan umat di tengah konflik politik, sehingga orang tidak mudah dikeluarkan dari komunitas akibat kesalahan yang diperselisihkan. Dalam konteks politik, Murji'ah cenderung menerima legitimasi pemimpin yang ada demi stabilitas dan menghindari perpecahan. Murji'ah berasal dari kata irja' yang berarti menunda atau menangguhkan penilaian. Secara historis, pemikiran ini mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan ketika terjadi konflik politik di kalangan umat Islam. Sebagian sahabat memilih tidak terlibat dalam perselisihan dan bersikap netral demi menjaga persatuan. Sikap irja' kemudian berkembang dalam bidang politik dan teologi. Dalam politik, Murji'ah cenderung tidak memihak dan menghindari konflik, sedangkan dalam teologi mereka menunda penilaian terhadap keimanan seseorang dan menyerahkan keputusan akhirnya kepada Allah (Mustofian, 2023).

Dalam sejarah Islam, aliran Murjiah memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Aliran ini dikenal dengan pandangannya yang menekankan penangguhan penilaian terhadap status keimanan seseorang kepada Allah, sehingga umat Islam tidak mudah menghakimi orang lain hanya berdasarkan perbuatannya. Pandangan tersebut

turut membuka ruang bagi sikap toleransi dan mengurangi kecenderungan fanatisme dalam menghadapi perbedaan. Selain itu, pemikiran Murjiah muncul di tengah konflik politik dan perbedaan pemahaman keagamaan dalam sejarah Islam, terutama terkait persoalan status keimanan umat Islam yang terlibat dalam konflik. Sikap ini memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dan berpotensi mengurangi pertentangan antarkelompok. Namun, pengaruh Murjiah tidak selalu dipahami secara sama oleh semua kelompok Islam karena setiap kelompok memiliki pandangan yang berbeda terhadap ajarannya. Dengan demikian, keberadaan Murjiah menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan pemikiran teologi Islam, khususnya dalam pembahasan tentang iman, dosa, dan hubungan antara keyakinan dengan perbuatan manusia (Muhamad Parhan dkk., 2024).

Faktor Historis dan Sosiopolitis Lahirnya Masing-masing Model

1) Faktor Lahirnya Model Syiah

Faktor pertama adalah persoalan suksesi setelah wafatnya Nabi. Sebagian sahabat yang setia kepada Ali, seperti Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin Aswad, dan Ammar bin Yasir, memandang Ali lebih berhak atas Pandangan ini diperkuat oleh keyakinan bahwa Nabi telah menetapkan Ali, sehingga kepemimpinan dipahami sebagai ketetapan, bukan hasil musyawarah. Pengembangan kepemimpinan dalam manajemen suksesi diarahkan untuk mempersiapkan dan membentuk regenerasi pemimpin yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, pengembangan kepemimpinan menjadi bagian penting dari tahap retensi karena berperan dalam mempertahankan serta mempersiapkan individu potensial untuk melanjutkan kepemimpinan di masa mendatang (Irfan, 2020). Kaderisasi dalam manajemen pendidikan Islam merupakan proses mempersiapkan dan membina calon kader yang memiliki kompetensi, integritas, serta komitmen untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dan perjuangan dalam organisasi maupun lembaga pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pola pembinaan kader yang terencana dan sistematis sebagai strategi dalam mengembangkan potensi kader sehingga mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas, berkarakter Islami, dan memiliki loyalitas terhadap organisasi (Cholis, 2021).

Faktor kedua adalah dominasi kekhalifahan pada masa Abbasiyah. Pada masa ini doktrin imamah semakin kuat sebagai dasar keagamaan untuk mempertahankan identitas dan otoritas komunitas Syiah. Perkembangan doktrin Syiah pada era modern semakin menarik untuk dikaji karena melibatkan dialog serta kritik dari berbagai kalangan di luar mazhab tersebut. Salah satu contohnya terlihat dalam kajian hermeneutika terhadap penafsiran Syiah, khususnya

mengenai riwayat Ahlul Bait dan konsep imamah yang dipahami secara beragam oleh para akademisi non-Syiah. Kritik hermeneutika tersebut tidak hanya memperlihatkan adanya perbedaan dalam metode penafsiran, tetapi juga mendorong berkembangnya pemikiran intelektual di kalangan Syiah dalam menanggapi berbagai kritik yang muncul. Oleh karena itu, perkembangan Syiah pada masa kini perlu dipahami dengan memperhatikan hubungan antara doktrin keagamaan, metode penafsiran, dan otoritas keagamaan yang terus berinteraksi dengan dinamika sosial serta tantangan akademik kontemporer (Rahmi dkk., 2026).

Dari sudut sosiologi pengetahuan, doktrin nash dan 'ishmah dapat dibaca sebagai cara kelompok yang tersisih dari kekuasaan merumuskan otoritas. Otoritas yang tidak dapat diraih melalui kekuasaan politik dirumuskan melalui penunjukan ilahi dan kesucian moral, sehingga legitimasi tidak bergantung pada siapa yang menguasai negara.

2) Faktor Lahirnya Model Khawarij

Sejarah mencatat sikap Khawarij yang ekstrem, yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar (takfir) dan menghalalkan kekerasan terhadap yang berbeda pendapat. Nilai integritas mereka tidak boleh dipisahkan dari kritik atas ekses tersebut. Adopsi nilai Khawarij hanya sah bila akuntabilitas dijalankan secara prosedural, proporsional, dan berkeadilan, dengan asas praduga tak bersalah, mekanisme klarifikasi, serta ruang pembinaan, bukan dengan stigmatisasi dan penghukuman moral yang mengorbankan sesama anggota komunitas. Melalui analisis kritis akses historis, pendidikan Islam diharapkan mampu merekonstruksi relevansi warisan intelektual klasik dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan transformasi teknologi di era digital. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesinambungan epistemologis antara tradisi keilmuan Islam dan dinamika modernitas, sehingga pendidikan Islam dapat melahirkan generasi Muslim yang memiliki kedalaman intelektual, integritas moral, serta kapasitas kritis dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas tantangan global (Hanafi dkk., 2025).

Konsep takfir merupakan tindakan menilai atau menganggap orang lain sebagai kafir karena dianggap telah keluar dari ajaran Islam. Istilah ini memiliki makna yang cukup negatif sehingga banyak sarjana Islam tidak ingin dikaitkan dengan praktik takfir. Pada dasarnya, takfir bukanlah ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, Rasulullah SAW menentang sikap berlebihan dalam menilai keimanan orang lain. Hal ini karena takfir dapat menimbulkan dampak yang serius, seperti seseorang dianggap sesat, dinyatakan keluar dari

Islam, bahkan dapat memicu tindakan kekerasan terhadap pihak yang dikafirkan (Abdul Rahim dkk., 2018).

Khawarij termasuk kelompok yang berasal dari pengikut Ali bin Abi Thalib, tetapi kemudian memisahkan diri dari barisannya karena menolak keputusan tahkim atau arbitrase dalam Perang Shiffin pada tahun 37 H terkait perselisihan mengenai kekhalifahan antara pihak Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah keluar dari kelompok Ali, mereka menuju suatu daerah bernama Harura', sehingga kelompok ini juga dikenal dengan sebutan al-Haruriyah. Pendapat lain menjelaskan bahwa penamaan tersebut dikaitkan dengan Surah An-Nisa' ayat 100 yang membahas tentang orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan pemahaman tersebut, mereka memandang diri sebagai kelompok yang meninggalkan kedudukan sebelumnya demi mengabdikan diri kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Selain itu, Khawarij juga menyebut diri mereka sebagai al-Syurah, yang berasal dari kata yasyri yang berarti menjual atau menukar. Istilah ini dikaitkan dengan Surah Al-Baqarah ayat 207, yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengorbankan dirinya demi memperoleh keridaan Allah Swt. Dengan demikian, sebutan al-Syurah mencerminkan keyakinan mereka bahwa pengorbanan diri merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Swt (Mahmud, 2016).

3) Faktor Lahirnya Model Murjiah

Pemikiran Murjiah mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika konflik politik meluas di kalangan umat. Sebagian sahabat memilih tidak terlibat dan bersikap netral demi menjaga persatuan. Motif utamanya adalah mencegah pertumpahan darah dan saling pengkafiran antar-Muslim yang terlibat dalam konflik, terutama sesudah peristiwa yang menyeret para sahabat ke dalam dua kubu berseberangan. Nilai model ini bagi lembaga pendidikan Islam terutama terletak pada inklusivitas, pendekatan restoratif, dan manajemen konflik. Lembaga pendidikan menghimpun beragam latar afiliasi dan pandangan, sehingga pemimpin dengan sikap *irja'* akan menahan diri dari penghakiman cepat, mengutamakan dialog, dan menjaga ruang perbedaan pendapat yang sehat. Pelanggaran yang dilakukan personel atau peserta didik pun dipandang sebagai ruang pembinaan dan pemulihan (*islah*), bukan semata hukuman, selaras dengan pedagogi yang humanis. Orientasi pada persatuan, pada gilirannya, membantu pimpinan meredam polarisasi dan menjaga kohesi organisasi. Manajemen konflik merupakan suatu proses untuk mengelola dan menyelesaikan konflik melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, serta pengarahan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Proses ini dilakukan dengan

memahami perilaku, kepentingan, dan sudut pandang masing-masing pihak agar konflik dapat ditangani secara tepat. Dalam hal ini, pihak penengah berperan mengumpulkan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang terjadi serta membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang berkonflik. Dengan demikian, pihak penengah dapat memperoleh kepercayaan dari kedua belah pihak sehingga penyelesaian konflik dapat berjalan dengan lebih efektif (Wardana dkk., 2024).

Konsep moderasi beragama atau wasathiyah memiliki dasar pemahaman yang sama di kalangan akademisi dan ulama, yaitu merujuk pada firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan sebagai ummatan wasathan, yakni umat yang berada di tengah-tengah, adil, dan mampu menjadi teladan bagi umat lainnya. Konsep wasathiyah bukanlah ajaran baru yang muncul pada abad ke-20 atau abad ke-14 Hijriah, melainkan telah menjadi bagian dari ajaran Islam sejak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an serta perilaku Nabi, para sahabat, dan generasi salaf saleh. Moderasi Islam mengajarkan umat untuk menjalankan agama secara seimbang, tidak berlebihan dalam bersikap, serta menghindari sikap ekstrem, baik yang terlalu keras maupun terlalu bebas. Dengan menerapkan prinsip wasathiyah, Islam diharapkan dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya menjadi ciri khas dalam kehidupan umat Islam, tetapi juga merupakan nilai penting yang perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini agar mereka terbiasa menghargai perbedaan, bersikap adil, dan menjalankan kehidupan secara seimbang (Yusriyah & Khaerunnisa 2023). Namun, penundaan penghakiman dapat berubah menjadi permisivitas dan pembiaran terhadap penyimpangan, serta melemahkan fungsi kontrol. Penerimaan pasif terhadap pemimpin yang ada juga dapat melanggengkan ketidakadilan. Oleh karena itu, inklusivitas harus diseimbangkan dengan standar etika dan akuntabilitas, dan sikap menunda penghakiman hanya berlaku pada vonis atas keimanan personal, bukan pada penegakan aturan organisasi.

Pendekatan restoratif memandang bahwa pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan aturan yang dilanggar, tetapi juga dapat merusak hubungan antarindividu dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan hubungan, perbaikan atas kerugian yang terjadi, serta penumbuhan rasa tanggung jawab daripada sekadar memberikan hukuman. Pendekatan restoratif juga menekankan keterlibatan sosial dibandingkan pengendalian melalui hukuman, sehingga perilaku seseorang diarahkan melalui dialog, partisipasi, dan rasa saling memiliki. Dalam lingkungan sekolah, pendekatan ini dapat diterapkan melalui berbagai cara, seperti diskusi kelompok

(circle), konferensi, mediasi, dan percakapan restoratif yang bertujuan membangun hubungan yang baik, memperkuat kebersamaan, serta menyelesaikan konflik secara damai (Annisa dkk., 2026).

Dalam etika organisasi, nilai-nilai etik dalam pendidikan merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam membentuk individu yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu menghargai perbedaan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif, adil, dan saling menghormati. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam menyeimbangkan penerapan aturan dengan penghargaan terhadap keberagaman, sehingga setiap individu dapat menjalankan tanggung jawabnya tanpa mengabaikan hak orang lain. Melalui pembiasaan nilai-nilai etik dalam interaksi sehari-hari, organisasi pendidikan dapat membangun hubungan yang harmonis, menjaga kebersamaan, serta menciptakan lingkungan yang tertib dan terbuka bagi semua pihak (Yusuf dkk., 2024).

Analisis Komparatif: Titik Temu dan Perbedaan Mendasar

Tabel 1. Perbandingan Tiga Model Kepemimpinan

Dimensi	Syiah	Khawarij	Murjiah
Dasar legitimasi	Penunjukan ilahi (nash)	Pemilihan dan kelayakan moral	Penerimaan atas kekuasaan yang ada
Kriteria pemimpin	Keturunan ahl al-bayt, ilmu, kesucian (‘ishmah pada Imamiyah)	Adil, mampu menjalankan syariat, tanpa batasan nasab atau suku	Tidak dirumuskan secara rinci
Pemimpin yang menyimpang	Secara doktrinal tidak terjadi pada imam (Imamiyah)	Wajib diturunkan, bahkan dilawan	Penghakiman ditangguhkan, persatuan diutamakan
Sikap terhadap kekuasaan	Oposisional terhadap penguasa non-imam	Oposisional dan sebagian bersenjata	Akomodatif
Latar social	Pendukung Ali dan ahl al-bayt, kelompok yang tersisih	Kalangan egaliter-puritan yang kecewa pada tahkim	Pihak yang ingin menghindari perpecahan
Tipologi	Absolut-karismatik	Radikal-egalitarian	Moderat-akomodatif

Pertama, ketiganya lahir dari krisis legitimasi yang sama setelah wafatnya Nabi dan konflik era Utsman serta Ali. Kedua, ketiganya memperlakukan kepemimpinan sebagai persoalan teologis, bukan sekadar urusan teknis pemerintahan: siapa yang memimpin dan bagaimana ia dinilai selalu terkait dengan iman, dosa, dan keadilan. Ketiga, ketiganya menjadikan keadilan dan integritas moral sebagai tolok ukur kepemimpinan, dengan jalan yang berbeda. Keempat, Syiah dan Khawarij sama-sama bersikap kritis terhadap penguasa yang dianggap tidak sah, sedangkan Khawarij dan Murjiah sama-sama berangkat dari pertanyaan tentang status pelaku dosa (Ansari & Husayn, 2023).

Perbedaan pertama menyangkut sumber legitimasi. Syiah bersumber dari penunjukan ilahi yang bersifat vertikal dan hierarkis, Khawarij dari kontrak komunal yang bersifat horizontal, dan Murjiah dari kenyataan politik yang ada. Perbedaan kedua menyangkut batas ketaatan: Syiah menuntut ketaatan pada imam yang ditetapkan, Khawarij mensyaratkan ketaatan pada keadilan pemimpin, sedangkan Murjiah mengutamakan stabilitas. Perbedaan ketiga menyangkut cara menyikapi pelaku dosa. Khawarij mengeluarkannya dari iman, Murjiah menangguhkan penilaian, dan Syiah menutup persoalan ini bagi imam melalui doktrin 'ishmah (Muslih dkk., 2021).

Ketiga model dapat dipetakan sebagai respons terhadap tiga pertanyaan pokok yang muncul dari krisis itu: siapa yang berhak memimpin (Syiah), atas dasar apa pemimpin boleh dicopot (Khawarij), dan bagaimana persatuan dijaga ketika pemimpin dipersengketakan (Murjiah). Pada satu poros, sumber legitimasi bergerak dari yang transendental (Syiah), kontraktual (Khawarij), hingga faktual (Murjiah). Pada poros lain, sikap terhadap kekuasaan bergerak dari oposisional hingga akomodatif. Pembacaan ini memperlihatkan bahwa ketiganya bukan sekadar daftar doktrin yang bertentangan, melainkan jawaban berbeda atas persoalan yang sama. Kemunculan pemikiran Sunni kemudian juga dapat dipahami sebagai respons terhadap gagasan-gagasan politik tersebut (Najibudin dkk., 2025).

Perpecahan umat Islam awal lebih tepat dipahami sebagai proses historis yang dibentuk oleh konteks sosial-politik daripada sekadar perbedaan doktrin. Krisis legitimasi pasca-wafatnya Nabi melahirkan kelompok-kelompok yang masing-masing memberi jawaban berbeda atas persoalan kepemimpinan. Karena itu, Syiah, Khawarij, dan Murjiah tidak cukup dibaca sebagai daftar doktrin yang bertentangan, melainkan sebagai respons terhadap kondisi politik yang sama (Gaiser, 2022). Dalam kerangka ini, Khawarij tampil sebagai gerakan protes yang memadukan kesalehan dengan oposisi terhadap penguasa. Syiah berporos pada kesetiaan kepada *ahl al-bayt* sebagai dasar legitimasi. Murjiah mencapai kematangan intelektualnya setelah semangat revolusioner sektarian era Umayyah mereda, sehingga sikap

akomodatifnya dapat dibaca sebagai upaya menjaga persatuan di tengah sengketa kepemimpinan, bukan sebagai teori politik yang utuh (Gaiser, 2022).

Pada Khawarij, gambaran tentang kewajiban menurunkan pemimpin yang zalim dan sikap oposisi bersenjata perlu dibaca dengan kehati-hatian metodologis. Kisah tentang Khawarij dalam historiografi klasik dibentuk oleh kepentingan penulis yang menyusun memori sejarah, sehingga kelompok ini kerap digambarkan secara ambivalen, sebagai pahlawan sekaligus tokoh jahat (Hagemann, 2021). Konsekuensinya, tipologi "radikal-egalitarian" lebih tepat diposisikan sebagai model analitis untuk perbandingan, bukan potret definitif kelompok historisnya. Pembacaan ini sejalan dengan kenyataan bahwa penafsiran modern atas Khawarij sangat beragam, dari yang menekankan aspek egalitarian hingga yang menonjolkan sisi ekstremismenya. Keragaman itu menunjukkan bahwa status pelaku dosa dan keadilan pemimpin tetap menjadi persoalan teologis-politik yang diperdebatkan.

Pada Syiah, doktrin Imamah menjadi dasar legitimasi ilahi (*nash*) sekaligus melandasi konsep kesucian (*'ishmah*) yang menutup kemungkinan imam menyimpang. Namun, tradisi ini tidak monolitik dalam menerjemahkan doktrin tersebut ke dalam teori kekuasaan. Pemikiran politik Syiah kontemporer memuat kritik terhadap bentuk pemerintahan yang dianggap terlalu absolut, termasuk terhadap teori *wilāyat al-faqīh*(Kawtharani, 2020). Karena itu, label "absolut-karismatik" paling tepat dikenakan pada doktrin Imamah klasik, dan tidak boleh digeneralisasi pada seluruh pemikiran politik Syiah masa kini.

Seluruh model tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks kekuasaan Umayyah yang konkret. Kajian tentang pemberontakan Khawarij pada masa Umayyah, termasuk afiliasi suku para pemimpinnya, memungkinkan klaim egalitarian Khawarij diuji secara historis, sehingga pembahasan tidak berhenti pada tataran ideal. Pembahasan tentang konsep kekuasaan (*mulk*) pada awal Islam turut menjelaskan bagaimana penerimaan atas kekuasaan yang ada, sebagaimana tampak pada Murjiah, memperoleh tempat di tengah umat yang ingin menghindari perpecahan (Marsham, 2020). Dengan demikian, ketiga model kepemimpinan dapat dipahami sebagai jawaban berbeda atas tiga pertanyaan pokok: siapa yang berhak memimpin, atas dasar apa pemimpin boleh dicopot, dan bagaimana persatuan dijaga ketika pemimpin dipersengketakan.

4. CONCLUSION

Perbedaan pemikiran politik Syiah, Khawarij, dan Murjiah berawal dari persoalan legitimasi kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Konflik politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perselisihan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, serta peristiwa tahkim menjadi latar berkembangnya perbedaan pandangan mengenai otoritas, keadilan, dan persatuan umat. Ketiga aliran

tersebut tidak hanya menunjukkan perbedaan teologis, tetapi juga mencerminkan respons terhadap kondisi sosial-politik umat Islam pada masa awal. Syiah menekankan imamah sebagai dasar legitimasi kepemimpinan, khususnya melalui konsep nash dan 'ishmah dalam pemikiran Imamiyah. Khawarij menekankan keadilan dan integritas moral, serta menganggap pemimpin yang menyimpang dapat kehilangan legitimasi. Sementara itu, Murjiah melalui konsep irja' cenderung menangguhkan penilaian keimanan seseorang kepada Allah Swt. untuk menghindari konflik dan menjaga persatuan umat.

Ketiga pemikiran tersebut membentuk spektrum kepemimpinan yang dapat dipahami melalui model absolut-karismatik, radikal-egalitarian, dan moderat-akomodatif. Syiah merepresentasikan model absolut-karismatik karena menempatkan imam sebagai pemegang otoritas keagamaan yang kuat. Khawarij mencerminkan model radikal-egalitarian karena menekankan kesetaraan dalam memperoleh kepemimpinan berdasarkan keadilan dan kesalehan, meskipun sebagian kelompoknya mengembangkan sikap ekstrem. Adapun Murjiah menunjukkan model moderat-akomodatif melalui penekanan pada penangguhan penilaian dan stabilitas politik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam klasik berkaitan erat dengan keyakinan teologis, keadilan, dan kebutuhan menjaga persatuan. Oleh karena itu, pemikiran Syiah, Khawarij, dan Murjiah perlu dipahami berdasarkan konteks historisnya sebagai bagian dari perkembangan pemikiran politik Islam dalam menjawab persoalan otoritas dan kekuasaan.

Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa jarak antara rumusan ideal dan praktik historis perlu selalu diperhitungkan. Doktrin tentang imam, keadilan pemimpin, atau penangguhan penilaian tidak lahir dalam ruang hampa. Doktrin-doktrin itu tumbuh di tengah persaingan politik yang konkret dan berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya (Gaiser, 2022). Murjiah, misalnya, tidak berhenti sebagai sikap politik, tetapi berkembang menjadi tradisi intelektual yang lebih mapan pada masa Abbasiyah. Hal serupa berlaku bagi Syiah dan Khawarij. Rumusan yang tampak tegas dalam tabel perbandingan sesungguhnya merupakan penyederhanaan atas proses panjang yang melibatkan banyak tokoh, wilayah, dan kepentingan.

Kehati-hatian ini berimplikasi pada cara tipologi digunakan. Model absolut-karismatik, radikal-egalitarian, dan moderat-akomodatif berfungsi sebagai alat bantu analitis untuk membandingkan, bukan sebagai kategori yang kaku. Kelompok yang diberi label tertentu dapat memuat variasi internal, dan gambaran tentangnya dapat dipengaruhi oleh sumber yang menuliskannya (Hagemann, 2021). Pada Syiah, perbedaan penafsiran tentang bentuk otoritas politik menunjukkan bahwa satu doktrin dasar dapat melahirkan beragam teori kekuasaan (Kawtharani, 2020). Pembacaan yang adil terhadap ketiga aliran karena itu menuntut kesediaan untuk

membedakan tiga hal: doktrin normatif, praktik politik, dan representasi dalam sumber.

Pada akhirnya, ketiga model menawarkan tiga cara menjaga keseimbangan antara otoritas, keadilan, dan persatuan. Syiah menekankan sumber otoritas yang dianggap pasti, Khawarij menekankan kontrol moral terhadap penguasa, dan Murjiah menekankan kesinambungan komunitas. Masing-masing pendekatan menanggung risiko. Otoritas yang terlalu terpusat membuka ruang kritik atas klaim kesempurnaan. Tuntutan moral yang terlalu ketat mudah berujung pada pengucilan dan konflik. Sikap akomodatif yang berlebihan dapat melemahkan kontrol terhadap penguasa. Perdebatan klasik ini tetap relevan sebagai bahan telaah tentang hubungan antara legitimasi, keadilan, dan stabilitas dalam pemikiran politik Islam (Marsham, 2020).

REFERENCES

Abdul Rahim, R. A., Ramli, M. A., & Syahmi Zulkepli, M. I. S. Z. (2018). Gejala Takfirisme Dalam Gerakan Ekstremisme Agama Semasa . *Jurnal PERADABAN*, *11*(1), 43–61. https://doi.org/10.22452/PERADABAN.vol11no1.3

Adiningsih, Y. A., Oktafiani, N., Nisa', I., & Adiningsih, I. (2020). KEPEMIMPINAN DALAM PRESPEKTIF TEOLOGI ISLAM. *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan*, *5*(1).

Annisa, S., Hidayat, M. R., Izzati, S. N., & Paramitha, N. A. (2026). Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Masalah Sekolah dan Masyarakat. *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, *4*(2).

Ansari, H., & Husayn, N. (Ed.). (2023). *Caliphate and Imamate: An Anthology of Medieval Muslim Texts on Political Theology* (1 ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108225267

Anshory, S., Citriadin, Y., & Maujud, F. (2024). TATA KELOLA PENDIDIKAN ISLAM: STRATEGI MANAJEMEN DAN TANTANGAN KONTEMPORER. *ASCENT: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management*, *2*(1), 36–41. https://doi.org/10.61553/ascent.v2i1.128

Ar, F. R. (2026). KRITIK EPISTEMOLOGIS DAN RELEVANSI TEOLOGI ISLAM DALAM MENJAWAB KRISIS MODERNITAS. *Pena Islam Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *9*(1).

Arifin, Z. (2021). PEMIKIRAN TEOLOGI, POLITIK DAN SOSIAL KHAWARIJ. *AL-IFKAR*, *XVI*(02).

Arrodji, F., Tuli, M. R. I., Sajid, Y. A., & Nurlaela, N. (2026). Perbedaan Fundamental Sumber Hadis Sunni dan Syiah: Dari Landasan Teologis hingga Kritik Kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4).

Cholis, Moh. N. (2021). Manajemen Kaderisasi dalam Mencetak Kader Organisasi Militan. *J-MPI*, *6*(1), 41–52. https://doi.org/10.18860/jmpi.v6i1.8743

Gaiser, A. R. (2022). *Sectarianism in Islam: The Umma Divided* (1 ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781139424790

Hafi, A., Santi, N., & Yamani, A. Z. (2025). Imāmah dalam Islam: Kajian Historis dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan Kontemporer. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, *2*(1).

Hagemann, H.-L. (2021). *The Kharijites in Early Islamic Historical Tradition: Heroes and Villains*. Edinburgh University Press. https://doi.org/10.1515/9781474450911

Hanafi, S. S. A. N., Kutbaniyah, A., Fadilah, A. S., Muktamiroh, R., & Rosyidah, A. (2025). BAIT AL-HIKMAH KE SMART CLASSROOM: EVOLUSI GAGASAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH DAN TEKNOLOGI. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *10*(03).

Irfan, M. (2020). MEWUJUDKAN SISTEM PERENCANAAN SUKSESI NASIONAL MELALUI PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH. *Civil Service*, *14*(1).

Kawtharani, F. W. (2020). *Political Thought in Contemporary Shi'a Islam: Muhammad Mahdi Shams al-Din*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28057-4

Latifa, D., Desnita, W., Hariandini, E., Najwa, S. A., & Putra, D. R. (2025). ALIRAN-ALIRAN TEOLOGI ISLAM: SEJARAH, KONSTRUK PEMIKIRAN, DAN PERKEMBANGAN DOKTRINAL. *Jurnal Pemikiran Islam dan Dinamika Sosial*, *1*(2).

Mahmud, A. (2016). KE-JABARIAH-AN DAN KE-QODARIAH-AN DALAM TIGA MADZHAB BESAR TEOLOGI KLASIK DAN DUNIA ISLAM MASA KINI. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, *2*(1).

Manzil, K. L., & Muttaqin, M. I. (2024). Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam (Pengertian, Karakteristik Kepemimpinan Rasulullah, Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Islam, dan Keberhasilannya). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, *1*(7), 734–743. https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i7.140

Marjuni, K. N. (2020). KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI SYIAH. *Transformasi : Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam*, *3*(2), 42–51. https://doi.org/10.47945/transformasi.v3i2.337

Marsham, A. (Ed.). (2020). *The Umayyad World* (1 ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315691411

Muhamad Parhan, Amanda Sephira Nuraini, Azahra Harianti, Dara Salsabila Rahman, Indra Hadi Kurniawan, & Muhammad Alviazha Qinthara. (2024). Sejarah Kemunculan dan Konsep Pemikiran Aliran Murjiah Serta Pengaruhnya Pada Masyarakat Islam Zaman Sekarang. *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *2*(2), 49–63. https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i2.1083

Mulyani, S., Rohmah, L., & Maimun. (2026). Syi'ah Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Suatu Konten Analisis. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, *6*(3).

Muslih, M. K., Mafaza, A. T., & Sahidin, A. (2021). A Critical Study On Ghaybah Of Imam Mahdi Concept In Shi'ah Imamiyah Ithna 'Ashariyyah. *Jurnal Ushuluddin*, *29*(2), 189–204. https://doi.org/10.24014/jush.v29i2.13981

Mustofian, A. H. (2023). ANALIS PEMIKIRAN KHAWARIJ DAN MURJI'AH (PERTENTANGAN PARADIGMA PEMIKIRAN TEOLOGI ISLAM). *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, *5*(2).

Najibudin, M., Hafsa, Hamidah, Z., & Febriani, S. (2025). Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara civilization*, *15*(02), 97–116. https://doi.org/10.51925/inc.v15i02.149

Rahmi, L., Lubis, A. N., Nazwa, A., Rezeki, S., Lubis, Z., & Basri, M. (2026). Aliran Syi'ah: Sejarah, Perkembangan dan Konsep Utama Pemikirannya. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1).

Sari, N. K. (2025). TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: STUDI KUALITATIF DI MTS NEGERI 1 MEDAN. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, *5*(3).

Wardana, A. K., Aulia, M. F. R., & Suharyat, Y. (2024). MANAJEMEN KONFLIK. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, *5*(1), 95–102. https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856

Yani, M. (2021). KONSEP DASAR KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM. *AL-HIKMAH : Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, *3*(2).

Yulistina, I., & Yustina, Y. (2025). Paradigma Pendidikan Islam dalam Arus Modernisasi: Tinjauan Filosofis dan Historis. *PANDAI: Jurnal Pendidikan*, *01*(01).

Yusriyah, & Khaerunnisa. (2023). MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *el-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, *02*(02).

Yusuf, M., Masrokan Mutohar, P., & Fuadi, I. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Etik dalam Membentuk Efektifitas Budaya Organisasi Lembaga Pendidikan. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *3*(1), 17–36. https://doi.org/10.37348/aksi.v3i1.510